

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 22

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 04 TAHUN 2005

**TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 Seri B;
  - b. bahwa besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 05 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.
3. Dupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Cianjur.
6. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
7. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam berbentuk tabung untuk memadamkan api;
9. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO<sub>2</sub> atau gas dry powder, ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
10. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
11. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter;

12. Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 meter;
13. Bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja dan produksi;
14. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kerja antara lain untuk pertemuan umum, kantor, Hotel, hiburan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, toko, shopping center, pasar, pendidikan, peribadatan, pergudangan dan lain-lain;
15. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat nunian;
16. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah dan atau air dari Perusahaan Daerah Air Minum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.
19. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 8, diubah sebagai berikut :

Struktur besarnya retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan :

a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran :

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/ bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydran, house real (penyalur air dalam gedung) , springkler dan alarm sistem setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005

BUPATI CIANJUR,


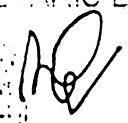
Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor 172.2/02/DPRD/2005 tanggal 1 Juni 2005.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH,

   
**S. H. ARNA**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 22 TAHUN  
2005 SERI B.